



USM

ISSN: 1412-5331

MAJALAH ILMIAH

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# SOLUSI

**ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA PT BANK CENTRAL ASIA, TBK KANTOR CABANG PEMBANTU SULTAN AGUNG SEMARANG)**

Yunus Effendi, Sri Purwanilai - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2010-2012)**

Abdul Karim - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PEMODELAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY DI BURSA EFEK INDONESIA MEDIO 2011-2014**

Zulfana, Saifudin - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, INTEGRITAS AUDITOR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR**

Khoiriyah, Ardiani Ika Sulistyawati - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, MOTIVASI EKSTRINSIK, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA AGEN ASURANSI PRUDENTIAL (STUDI KASUS PADA KANTOR PEMASARAN MANDIRI PRU PRIORITAS SEMARANG)**

Ferronica Eghty Atmaja, Dwi Widi Pratito Sri Nugroho - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA, CUSTOMER EXPERIENCE DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP KEPUTUSAN ONLINE BOOKING (STUDI KASUS PADA PATRA JASA SEMARANG CONVENTION HOTEL)**

Kumala Sari, Totok Wibisono - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013)**

Ayu Kusuma Ningrum, Febrina Nafasati Prihantini - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**OUTSOURCING SUMBER DAYA MANUSIA (UKURAN DAN KEMATANGAN PERUSAHAAN)**

Edy Mulyantomo - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF**

Titi Mulyani - Fakultas Hukum Universitas Semarang

**DETERMINAN PEMBIAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH SE-INDONESIA)**

Oyong Lisa - STIE Widyagama Lumajang

# MAJALAH ILMIAH SOLUSI

Volume 15, Nomor 2, April 2016

## DESKRIPSI

Majalah Ilmiah Solusi Mengkaji Masalah-Masalah Sosial, Ekonomi dan Bisnis

## KETERANGAN TERBIT

Terbit Pertama Kali Juli 2002 dan Selanjutnya Terbit Tiga Bulan Sekali (Januari, April, Juli dan Oktober)

## PENERBIT

Fakultas Ekonomi USM

## ALAMAT PENERBIT

Jl. Soekarno, Hatta Semarang  
Telp. 024-6702757 Fax. 024-6702272

## PENGELOLA

Editor in Chief : Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE MM

Vice Editor : Drs. Witjaksono EH, MM

Managing Editor : Saifudin, SE, M.Si

Layout & Typesetting: Susanto, SE, MM

Administration & Circulation: Eviatiwi K.S. SE, MM

Board of Editors:

1. Prof. Dr. H. Pahlawansjah H, SE, ME (USM)
2. Prof. Supramono SE, MBA, DBA (UKSW)
3. Prof. Drs. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt, PhD (UNDIP)
4. Prof. Dr. Agus Suroso, MS (UNSOED)
5. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (UNISSULA)
6. Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME, M.Kom (UNSRI)

ISSN: 1412-5331

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap tiga bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru dibidang sosial, ekonomi dan bisnis.

Pada kesempatan ini penerbit menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan artikel-artikelnya. Penerbit akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kalangan akademisi maupun praktisi baik dari dalam maupun luar Universitas Semarang untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.

Penerbitan majalah ilmiah "SOLUSI" kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pengembangan persemaian khasanah pengetahuan dibidang sosial, ekonomi dan bisnis.

Akhir kata semoga majalah ilmiah "SOLUSI" dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami

Redaksi



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGARAWATI	
UNIVERSITAS SEMARANG	
FAKULTAS EKONOMI	
DEPARTEMEN PERUSAHAAN	
No. Inv	258 EA 2016
TGL/TH	3 Mei 2016
Paraf	

**DAFTAR ISI**

**JUDUL KARYA ILMIAH**

<b>HALAMAN:</b>	
144 - 155	ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA PT BANK CENTRAL ASIA, TBK KANTOR CABANG PEMBANTU SULTAN AGUNG SEMARANG) Yunus Elfanus, Sri Purwantini - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
156 - 175	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2010-2012) Abdul Karim - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
176 - 188	PEMODELAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY DI BURSA EFEK INDONESIA MEDIO 2011-2014 Zuliana, Saifudin - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
189 - 201	PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, INTEGRITAS AUDITOR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR Khoiriyah, Ardiani Ika Sulistyawati - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
202 - 214	PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, MOTIVASI EKSTRINSIK, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA AGEN ASURANSI PRUDENTIAL (STUDI KASUS PADA KANTOR PEMASARAN MANDIRI PRU PRIORITAS SEMARANG) Ferronica Egthy Atmaja, Dwi Widi Pratito Sri Nugroho - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
215 - 226	ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA, <i>CUSTOMER EXPERIENCE</i> DAN <i>PERCEIVED EASE OF USE</i> TERHADAP KEPUTUSAN <i>ONLINE BOOKING</i> (STUDI KASUS PADA PATRA JASA SEMARANG CONVENTION HOTEL) Kumala Sari, Totok Wibisono - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
227 - 244	PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013) Ayu Kusuma Ningrum, Febrina Nafasati Prihantini - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
245 - 249	OUTSOURCING SUMBER DAYA MANUSIA (UKURAN DAN KEMATANGAN PERUSAHAAN) Edy Mulyantomo - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
250 - 267	PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF Tri Mulyani - Fakultas Hukum Universitas Semarang
268 - 282	DETERMINAN PEMBIAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP <i>ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX</i> (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH SE-INDONESIA) Oyong Lisa - STIE Widyagama Lumajang

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun  
2010-2012)**

**Abdul Karim**

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Diterima: Oktober 2015, Disetujui: Januari 2016, Dipublikasikan: April 2016

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the effect of Economic Growth, Regional Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) for Capital Expenditure budget allocation on the district/cities in Central Java Province. The sample that used in this study were 35 Government Districts/Cities in Central Java Province. The type of data used are secondary data obtained from Actual Budget report (APBD) from 2010-2012 were obtained through the Central Statistics Agency (BPS) of Central Java province. The data collection method used purposive sampling by taking the entire population census. The analysis tool used multiple linear regression with t test, F test, and test the coefficient of determination. The results showed that the Regional Own Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU), which has an effect on capital expenditures. Mean while, Economic Growth and Special Allocation Fund (DAK) have no significant effect on Capital Expenditure. For the local government are expected to increase Regional Own Revenue component so it can be increased so that the allocation for capital expenditure can be added, and also can reduce the dependence on Central Government fund transfers.*

*Keywords : Capital Expenditure, Economic Growth, Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pada tahun 2010-2012 serta Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2009-2012 yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah maupun Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan selalu meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah di Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2002, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tersebut juga memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah daerah melalui anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat bagi legislatif (DPRD) untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah).

Aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap seperti peralatan, bangunan dan infrastruktur. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Selain hal tersebut, keterlibatan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur perlu diperluas dan ditingkatkan.

Fenomena yang terjadi saat ini menurut data dari Ditjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata nasional rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/ kota se-provinsi tahun 2013 sebesar 25,36% (naik dari tahun 2012 yang hanya mencapai 24,1%). Jumlah tersebut masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah yang secara nasional menunjukkan nilai rata-rata 42,78%. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal masih relatif rendah dibanding untuk belanja pegawai. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Melihat adanya kondisi Belanja modal dalam APBD kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004 dalam Pungky Ardhani, 2011). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri, yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, sehingga hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah. Yang termasuk dalam dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian DAU menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan. Penelitian lain tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Jawa Timur oleh Rizanda Ratna Pradhita (2008), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sheila Ardhian Nuarisa (2013) yang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, dengan periode penelitian terbaru dan rentang waktu yang lebih panjang yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Alasan dipilihnya Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah karena menurut data Ditjen Perimbangan Keuangan Tahun 2013, Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah memiliki rasio Belanja Modal per kapita Pemerintah Kabupaten/ Kota yang cukup rendah yaitu Rp. 0,23 juta, dimana rata-rata rasio Belanja Modal kabupaten dan kota se-provinsi secara nasional adalah Rp 0,97 juta, sehingga menarik untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010 - 2012)”.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal, (2) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal, (3) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal, serta Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

#### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

##### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Menurut Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal



pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor yang berdampak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwasemakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut :

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan.

Abdullah & Halim (2004) dalam Anggiat Situngkir (2009) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir & John Sihar Manurung (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Menurut PP No. 25 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh *Holts-Eakin et al* dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011).

Prakoso (2004) dalam Rizanda Ratna Pradita (2008) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja



modal akan meningkat. Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

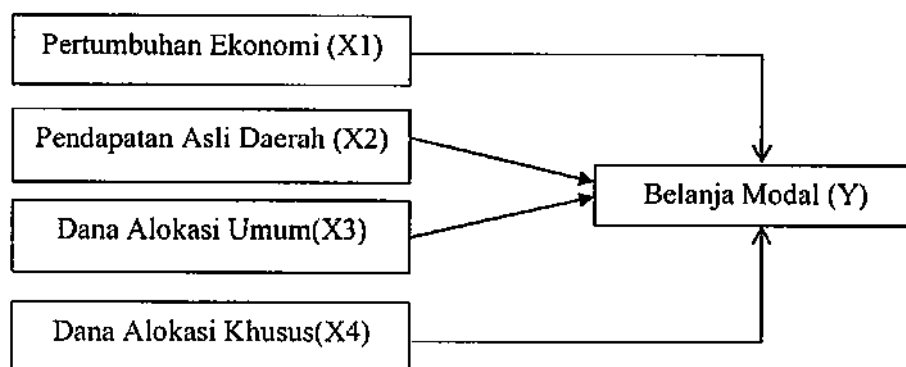
Sumber dana perimbangan yang kedua adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Contoh untuk program kesehatan berupa program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasarana puskesmas di daerah pelosok. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, sama halnya dengan hasil penelitian dari Sheila Ardian Nuarisa (2013). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

#### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dimana hipotesa yang dirumuskan adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ & + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja} \\ & \text{Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset} \\ & \text{Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

#### 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Sedangkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut rumus menghitung pertumbuhan ekonomi :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

#### 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPS). Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{PD} + \text{RD} + \text{HPKD} + \text{LPS}$$

#### 4. Dana Alokasi Umum

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dimana kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sehingga DAU untuk daerah provinsi maupun kabupaten/ kota dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

### 5. Dana Alokasi Khusus

Menurut pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah} \\ \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) - \text{Belanja PNSD}$$

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi bukan sekedar jumlah pada subyek atau obyek, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, dimana teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* atau pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan karakteristiknya, yang digunakan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana kabupaten dan kota tersebut menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2010 – 2012. Dari karakteristik di atas dapat dilihat yang termasuk sampel adalah keseluruhan dari populasi karena memenuhi kriteria, yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/ kota.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan berupa data kuantitatif atau angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai variabel-variabel terkait dalam penelitian.

Sumber data untuk penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2010 - 2012 kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, dimana dapat diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan yang diperoleh dari buku "Jawa Tengah Dalam Angka 2012" dan "Jawa Tengah Dalam Angka 2013", atau melalui website [www.bappeda.jatengprov.go.id](http://www.bappeda.jatengprov.go.id). Selain itu juga dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

### Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, namun sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu akan dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari Uji normalitas, Uji multikolonieritas, Uji autokorelasi dan Uji heteroskedastisitas. Sedangkan pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu dengan Uji t, Uji F dan Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota, dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012). Sampel yang diambil melalui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi yaitu yang memiliki pendapatan daerah aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD.

### 2. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang bersumber pada Laporan Realisasi APBD dari tahun 2010 hingga tahun 2012 diperoleh deskripsi mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari suatu data ini dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	105	,017	,066	,05114	,008908
PAD	105	32710581	780969273	111049195,13	90008363,069
DAU	105	238069009	1057808013	605738382,13	176220207,346
DAK	105	15046993	147884197	62928184,36	23656052,310
BM	105	21200833	351853782	137425635,74	70615792,381
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2015

Tabel di atas menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian, dengan jumlah N sampel sebanyak 105 yaitu 35 Kabupaten/ Kota selama tiga tahun. Variabel-variabel independen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal (BM).

Menurut tabel di atas menunjukkan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PE) dari 105 data kabupaten/ kota di Jawa Tengah adalah 5,114%, dengan pertumbuhan terendah adalah 1,7% pada Kabupaten Klaten tahun 2010 dan tertinggi Kabupaten Sragen tahun 2010 yaitu sebesar 6,6%. Standar deviasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,89% dimana lebih kecil dari nilai rata-ratanya, menunjukkan variasi yang kecil atau rendahnya kesenjangan antara nilai terendah dan nilai tertinggi.

Pada variabel independen kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai rata-ratanya adalah Rp. 111.049.195.130,-. Nilai tertingginya Rp.780.969.273.000,- yaitu PAD Pemkot Semarang pada tahun 2012, sedangkan nilai terendah adalah Rp. 32.710.581.000,- pada Pemkot Pekalongan tahun 2010. Standar deviasi PAD adalah Rp. 90.008.363.000,- lebih



dari 30% dari nilai rata-rata, yang menunjukkan adanya variasi yang besar pada variabel PAD 35 kab/ kota yang menjadi sampel. Selanjutnya pada variabel ketiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp. 605.738.382.130,- dengan nilai tertinggi pada Pemkab Cilacap tahun 2012 sebesar Rp. 1.057.808.013.000,- dan nilai terendah Rp. 238.069.009.000,- yaitu Pemkot Salatiga pada tahun 2010. Nilai standar deviasinya sebesar Rp. 176.220.207.346,- menunjukkan adanya variasi yang rendah karena nilainya lebih kecil dibandingkan 30% dari nilai mean.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 62.928.184.360,- dengan nilai tertinggi Rp. 147.884.197.000,- yaitu Pemkab Jepara tahun 2010 dan nilai terendah Pemkot Magelang tahun 2010 sebesar Rp. 15.046.993.000,-. Nilai standar deviasi sebesar Rp. 23.656.052.310,- lebih dari 30% dari nilai rata-rata yang menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi dari variabel DAK. Dan pada variabel Belanja Modal (BM) menghasilkan nilai mean sebesar Rp. 137.425.635.000,- nilai tertingginya terdapat pada Pemkot Semarang tahun 2010 sebesar Rp. 351.853.782.000,- dan nilai terendah Rp. 21.200.833.000,- yaitu Pemkab Blora pada tahun 2010. Sedangkan standar deviasinya sebesar Rp. 70.615.792.381,- dimana nilainya lebih besar dari 30% dari nilai mean menunjukkan adanya variasi yang besar.

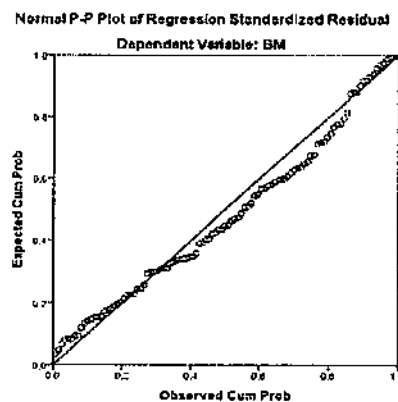
### 3. Analisis Data

Analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran jawaban atas variabel-variabel yang diteliti dari data yang sudah terkumpul terkait dengan rumusan dan hipotesis yang diajukan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, namun sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik.

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian asumsi ini dilakukan melalui pengamatan terhadap *Normal Probability Plot*. Hasil pengujian normalitas grafik P-Plot dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :



Gambar 2 Grafik *Normal Probability Plot*

Dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain dapat dianalisis dengan grafik normal P-plot diatas, uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian kali ini adalah pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) sebagai berikut :

Tabel 2 Uji Kolmogorov – Smirnov

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	50854809.70837810
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.881
Asymp. Sig. (2-tailed)		.420

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Dari hasil uji normalitas besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0.881 dan signifikansi pada 0,420. Karena hasil signifikansi sebesar  $0,420 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian iniberdistribusi normal.

**b. Uji Multikolonieritas**

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independennya. Diagnosa secara sederhana terhadap tidak adanya multikolonieritas didalam model regresi adalah jika variabel independen mempunyai angka *tolerance* diatas ( $>$ ) 0,1 dan mempunyai nilai *VIF* di bawah ( $<$ ) 10. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PE	.859	1.164
PAD	.705	1.418
DAU	.400	2.503
DAK	.457	2.189

Tabel hasil uji multikolonieritas menunjukkan untuk keempat variabel bebas, angka VIF ada di bawah 10 dan nilai tolerance masing-masing variabel bebas berada di atas 0,1 yang artinya bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen.

**c. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan dengan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melihat besaran *Durbin-Watson*. Jika nilai *DW test* terletak diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti bebas dari gangguan autokorelasi, sedangkan jika nilai *D-W* terletak dibawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif dan jika nilai *D-W* terletak diatas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,694 <sup>a</sup>	,481	,461	51861933,413	1,449

a. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

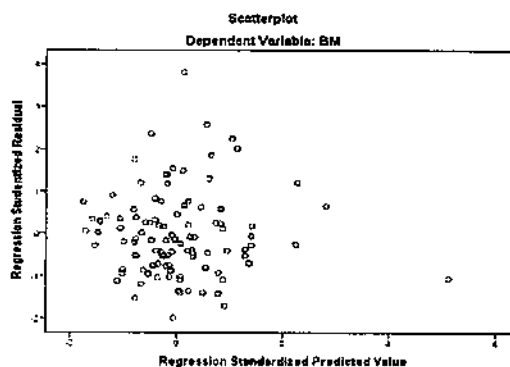
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Hasil dari perhitungan SPSS menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,449 yang terletak diantara  $-2$  sampai  $+2$  sehingga disimpulkan bahwa bebas dari gangguan autokorelasi.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 3 Grafik Scatter Plot**

Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Berdasarkan grafik *scatterplots* diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi belanja modal berdasarkan masukan variabel independen pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK.

Selain menggunakan grafik akan dilakukan Uji Park. Uji Park untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan meregres kuadrat residual sebagai variabel

dependen dengan variabel independen. Dengan bantuan output SPSS, aturan keputusan uji Park adalah apabila nilai signifikansi masing-masing variabel dependen di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Park  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.349	13.527		.913	.363
LnPE	.800	1.009	.086	.793	.430
LnPAD	-.043	.567	-.010	-.076	.939
LnDAU	.888	1.266	.142	.702	.484
LnDAK	.395	.847	.085	.467	.642

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2015

Dari keempat regresi di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

▪ **Analisis Regresi Berganda**

Untuk mencari pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu model analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk hipotesis tentang pengaruh variabel secara simultan mampu untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antar variabel bebas atau secara parsial. Pengolahan data dengan program IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 20 memberikan nilai koefisien persamaan regresi sebagai berikut :

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-23910259,583	34886484,799		-,685	,495
PE	328175305,878	615857959,393	,041	,533	,595
1 PAD	,272	,067	,346	4,040	,000
DAU	,195	,046	,487	4,270	,000
DAK	-,059	,318	-,020	-,186	,853

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder yang diolah 2015

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan *Unstandardized Coefficients*. Hal ini dikarenakan masing-masing variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi pada masing-masing variabel dalam menerangkan variabel terikatnya, dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dengan rumus persamaan diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:



$$\text{Belanja Modal} = -23910259,583 + 328175305,878 \text{ PE} + 0,272 \text{ PAD} + 0,195 \text{ DAU} - 0,059 \text{ DAK}$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- $a$  = konstanta (nilai mutlak Y) sebesar -23910259,583, artinya apabila nilai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus = 0, maka Belanja Modal yang dilakukan pemerintah sebesar Rp. 23.910.259,583.
- $\beta_1$  = koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 328175305,878 yang berarti bahwa setiap perubahan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka akan menaikkan variabel Belanja Modal sebesar Rp. 328.175.305,878, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan searah, dimana naiknya variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan berpengaruh pada peningkatan variabel Belanja Modal sebesar 328175305,878 satuan.
- $\beta_2$  = koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,272 yang berarti bahwa setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan berpengaruh pada variabel Belanja Modal sebesar 27,2% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan searah, dimana naiknya variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan berpengaruh pada peningkatan variabel Belanja Modal sebesar 0,272 satuan.
- $\beta_3$  = koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,195 yang berarti bahwa setiap perubahan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan berpengaruh pada variabel Belanja Modal sebesar 19,5% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan searah, dimana naiknya variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1 satuan berpengaruh pada peningkatan variabel Belanja Modal sebesar 0,195 satuan.
- $\beta_4$  = koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar -0,059 yang berarti bahwa setiap perubahan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1% akan berpengaruh pada variabel Belanja Modal sebesar 5,9% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, dimana naiknya variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1 satuan maka variabel Belanja Modal akan turun sebesar 0,059 satuan.

#### ▪ Pengujian Hipotesis

##### a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan (*level of significant*) 5% atau 0,05. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ), yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikan lebih besar maka  $H_0$  ditolak.

Untuk menentukan nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (n-k-1)$  dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen dengan kriteria uji adalah :

1) diterima bila :  $t_{hitung} < t_{tabel} \text{ atau } -t_{hitung} > -t_{tabel}$  dengan signifikan  $> 0,05$

2) ditolak bila :  $t_{hitung} > t_{tabel} \text{ atau } -t_{hitung} < -t_{tabel}$  dengan signifikan  $< 0,05$

Berikut adalah hasil perhitungan uji t dengan menggunakan IBM SPSS versi 20 :

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-23910259,583	34886484,799		-,685	,495
PE	328175305,878	615857959,393	,041	,533	,595
1 PAD	,272	,067	,346	4,040	,000
DAU	,195	,046	,487	4,270	,000
DAK	-,059	,318	-,020	-,186	,853

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2015

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial sebagai berikut :

**1. Pengujian H<sub>1</sub> : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi anggaran Belanja Modal**

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 0,533$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1,984$  dan nilai signifikan sebesar 0,595 lebih besardibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 5\% = 0,05$  , artinya Ho diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi anggaran Belanja Modal secara parsial. Kesimpulan H1ditolak.

**2. Pengujian H<sub>2</sub> : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.**

Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 4,040$  lebih besardarit<sub>tabel</sub> = 1,984dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 5\% = 0,05$  , artinya Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi anggaran Belanja Modal secara parsial. Kesimpulan H2diterima.

**3. Pengujian H<sub>3</sub> : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.**

Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 4,270$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,984$  dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 5\% = 0,05$  , artinya Ho ditolak yang berarti menunjukkan pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal secara parsial. Kesimpulan H3diterima.

**4. Pengujian H<sub>4</sub> : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.**

Hasil perhitungan dengan menggunakan IBM SPSS versi 20 dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = -0,186$  lebih kecil darit<sub>tabel</sub> = -1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,853 lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 5\% = 0,05$  , artinya Ho diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal secara parsial. Kesimpulan H4ditolak.

**b. Uji Statistik F**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. Uji F dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *level of significant* 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak, artinyasecara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, namun jika nilainya lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara

simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Untuk menentukan nilai F tabel digunakan tingkat signifikansi=5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df1 = (k-1)$  dan  $df2 = (n-k)$ , dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun kriteria ujinya adalah sebagai berikut:

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dengan signifikan  $> 0,05$  : Ho diterima, Ha ditolak  
Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan signifikan  $< 0,05$  : Ho ditolak, Ha diterima

**Tabel 8 Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	249639360165912000.00	4	62409840041477900.00	23.204	,000 <sup>b</sup>
Residual	268966013729437000.00	10	2689660137294360.000		
Total	518605373895348000.00	10			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

Sumber: Data sekunder yang diolah 2015

Dari hasil uji F pada tabel ANOVA di atas diperoleh F hitung sebesar 23.204 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dibandingkan dengan nilai F tabel yaitu 2,46 ( $df1 = 4$ ,  $df2 = 100$ ) maka nilai F hitung 23.204 lebih besar ( $>$ ) dari F tabel 2,46. Tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 5%. Maka dari hasil tersebut dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dengan analisis tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

**Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 <sup>a</sup>	.481	.461	51861933.413

a. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,461. Hal ini berarti 46,1% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya sebesar 53,9% (100%-46,1%) dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di luar model.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) maupun Pungky Ardhani (2011) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

Hal ini disebabkan adanya penyerapan anggaran belanja modal yang tidak optimal dan adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta kelayakan dan ketersediaan fasilitas umum tiap daerah. Sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun penyerapan anggaran belanja modal tidak signifikan. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/ kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Variabel independen kedua yang dapat memprediksi pengalokasian anggaran Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Kartikasari (2007), Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009), Pungky Ardhani (2011), serta penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardian Nuarisa (2013) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun semakin tinggi. Setiap penyusunan APBD, jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Ini menunjukkan bahwa antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil ini mendukung penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Prakoso (2004) dalam Sheila Ardian Nuarisa (2013) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Besarnya jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mempengaruhi besarnya belanja modal yang dialokasikan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa banyak Pemerintah Daerah yang masih tergantung pada penerimaan transfer dari pusat ini untuk membiayai pengeluarannya, dalam hal ini belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat.



### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan arah yang berlawanan atau negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/ kota yang mendapatkan DAK yang rendah akan cenderung memiliki belanja modal yang meningkat atau sebaliknya. Ini dapat disebabkan karena apabila variabel yang lain yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum besar maka akan menyebabkan belanja modal meningkat, sehingga dapat menyebabkan Pemerintah Pusat mengurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah dianggap mampu mendanai belanja modalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya jumlah DAK yang diterima tidak mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Hal ini disebabkan karena besarnya alokasi DAK relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan lain yang ditransfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

Selain itu Alokasi DAK sebagian besar lebih dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadiprioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Alokasi DAK tidak secara langsung berhubungan dengan belanja modal seperti jalan dan jembatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pungky Ardhani (2011), yang juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI**

#### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 20 seperti yang telah dibahas sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal, pernyataan H1 ditolak.
2. Terdapat pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal, pernyataan H2 diterima.
3. Terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal, pernyataan H3 diterima.
4. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal, pernyataan H4 ditolak.
5. Hasil uji F menghasilkan F hitung sebesar 23,204 yang apabila dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,46 maka nilai F hitung (23,204) lebih besar dari F tabel (2,46), serta tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
6. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,461, yang berarti bahwa 46,1% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya sebesar 53,9 % dijelaskan oleh faktor- faktor lain selain variabel yang telah diteliti.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya selalu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk meningkatkan penerimaan daerah, sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.
2. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan restrukturisasi sumber daya manusia untuk menekan belanja pegawai dengan lebih menekankan pada kualitas pegawai daripada kuantitas, sehingga lebih mengutamakan alokasi belanja daerah kepada belanja modal.

### Keterbatasan Penelitian

1. Hasil koefisien determinasi (*adjusted R-square*) yang sebesar 0,461 yang berarti bahwa variabel Belanja Modal hanya dipengaruhi sebesar 46,1% oleh keempat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK. Ini menunjukkan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen tidak begitu besar.
2. Terdapat keterbatasan dalam memperoleh data Laporan Realisasi APBD terkini, dikarenakan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data dua tahun sebelum tahun terbit / cetak. Sehingga pada tahun 2014, data terbaru yang dikeluarkan BPS adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2012.

### Agenda Penelitian yang Akan Datang

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/ Kota pada provinsi lain, misalnya yang memiliki rasio Belanja Modal per kapita Pemerintah Kabupaten/ Kota yang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah yaitu Provinsi DIY (Deskripsi Analisis APBD Tahun 2013) sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih signifikan.
2. Dikarenakan nilai *adjusted R square* pada penelitian ini masih kurang dari 50%, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan ataupun menambah variabel independen lain, yang mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap belanja modal, seperti Dana Bagi Hasil, belanja pegawai, pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhany, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2012. Laporan Realisasi APBD Pemkab/ Pemkot se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. Laporan Realisasi APBD Pemkab/ Pemkot se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. Laporan Realisasi APBD Pemkab/ Pemkot se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2012. Jawa Tengah Dalam Angka 2012
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. Jawa Tengah Dalam Angka 2013

- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Simposium Nasional Akuntansi X
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Edisi 6. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nuarisa, Sheila Ardhan. 2013. "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia
- Pradita, Rizanda Ratna. 2008. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur". Jurnal Universitas Negeri Surabaya
- Santoso, Singgih. 2014. Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS (Edisi Revisi). Elex Media Komputindo. Jakarta
- Situngkir, Anggiat dan John Sihar Manurung. 2009. "Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara". Jurnal Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- \_\_\_\_\_. "Cara Menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)". 2004. <http://www.bukukerja.com/2013/05/cara-menghitung-laju-pertumbuhan.html>
- \_\_\_\_\_. Mawitjere, Prima. "Dana Alokasi Khusus". 19 Maret 2013. <http://primallifejournal.wordpress.com/2013/03/19/dana-alokasi-khusus-dak/>
- \_\_\_\_\_. Pratiwi, Tiara. "Laju Pertumbuhan Ekonomi". 3 Mei 2014. <http://www.tiararoo.blogspot.com/2014/05/22-laju-pertumbuhan-ekonomi.html>
- \_\_\_\_\_. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemeterian Keuangan. "Deskripsi Analisis APBD Tahun 2013". 2013. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/345/deskripsi%20analisis%20apbd%202013%20pdf-1.pdf>